



SUMBER BERITA

SELASA, 05 NOVEMBER 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

PLD Tak Tahu Peruntukan DD Geramat

**Silpa DD 2017
Rp 35 Juta Tidak Jelas**

KOTA BINTUHAN - Pengusutan kasus dana desa (DD) di Desa Gramat tahun 2018 terus bergulir. Kemarin (4/11), penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Kaur memeriksa Pendamping Lokal Desa (PLD) bernama Sukmawati. Dihadapan penyidik dia mengaku tidak tahu jika ada anggaran untuk pembangunan gedung desa dan anggaran lainnya yang diplotkan dari DD tersebut.

Alasannya, karena mantan kades Gramat tertutup, sehingga anggaran DD

tahun 2018 banyak tidak jelas. Dia hanya mengetahui ada pencairan DD tahap pertama untuk Desa Gramat. Dana itu diperuntukkan membuka jalan desa. Sedangkan untuk pencairan tahap II dan III dia sama sekali tidak tahu.

"Setahu saya hanya DD tahap pertama itu yang saya tahu untuk pembangunan badan jalan. Dan itu saya tahu dan saya melihatnya langsung untuk yang lainnya saya tidak tahu pak. Karena hampir semua kades tertutup soal anggaran desa ini," kata Sukma Wati singkat.

Tidak hanya itu saja, soal sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DD Gramat tahun 2017 Rp 35 juta yang ditambahkan

ke DD tahun 2018 juga sudah dicairkan oleh mantan kades. Namun sayang dana tersebut tidak jelas peruntukannya, karena tidak digunakan sesuai peruntukannya. Hal ini juga menjadi pertanyaan penyidik. Sementara itu para saksi yang dimintai keterangan tidak mengetahui penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan data, untuk total DD Gramat tahun 2018 sebesar Rp 803 juta yang terbagi untuk pemberdayaan sebesar Rp 140,7 juta dan pembangunan Rp 534 juta lebih dan sementara untuk penyelenggaraan pemerintah desa Rp 128 juta lebih. Dari data yang ada dialokasikan untuk pembangunan terdiri dari pembukaan

jalan Rp 84 juta lebih, gedung kantor desa Rp 364,7 juta, pembangunan tembok penahan Rp 60,2 juta dan pembangunan siring pasang Rp 24,7 juta.

Dugaan sementara pembangunan gedung desa tidak dilaksanakan, termasuk juga siring pasang dan tembok penahan. Sehingga dilaporkan ke Polres Kaur. Terkait dengan kasus ini penyidik memastikan akan memanggil semua pihak terkait termasuk nantinya pihak kecamatan, PMD dan juga Inspektorat Kaur.

"Untuk sementara kita masih terus melakukan pemeriksaan dari perkembangan ada juga dana Silpa 2017

temuan Kejari Kaur yang dikembalikan ke kas desa Rp 35 juta itu juga belum jelas. Makanya masih banyak lagi data yang akan kita gali, setelah itu baru kita akan turun ke lapangan untuk melihat bangunannya ada atau tidaknya," kata Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si.

Sebelumnya penyidik Tipikor Polres Kaur juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara desa Gramat. Kemudian Tim Pelaksana Kegiatan (TKP) dan juga pengawas infrastruktur desa yang dimintai keterangan terkait DD Gramat yang diduga banyak fiktif. (cik)